

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada sektor publik terkait pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang besar, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi pada jaman sekarang semakin besar dan beragam. Kualitas pelaporan keuangan bagi sebuah entitas sektor publik harus memenuhi karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan di lingkup sektor publik harus mencakup informasi keuangan yang berisi, seluruh kegiatan bisnis dari satuan kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pelaporan keuangan sektor publik lingkup pemerintah/daerah harus mengacu pada peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur keuangan daerah. Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur termasuk dalam lingkup entitas sektor publik yang berwenang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Proses menghasilkan informasi yang disusun menjadi laporan keuangan sektor pemerintah/daerah wajib untuk membuat sistem akuntansi, agar pelaporan keuangan yang dihasilkan berkualitas baik dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan, maka diperlukan Sistem akuntansi pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah, yang penyusunannya terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penyusunan laporan keuangan di organisasi pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah harus mengacu pada SAP. SAP pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/ bupati/walikota yang berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai dasar umum untuk penyusunan laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis prosedur yang berhubungan dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. SAPD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri dalam Negeri. Salah satunya adalah Pemendagri No. 13 Tahun 2006. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang memuat pedoman dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

SAKD tercantum 2 subsistem yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD adalah patokan untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menerapkan sistem keuangan daerah yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang berguna bagi pihak untuk kepentingan lainnya. Pada sistem akuntansi SKPD teknik yang digunakan yaitu pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik merupakan konsep tersruktur posisi keuangan

akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Organisasi yang berkaitan bidang sektor publik, harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana masyarakat dan laporan keuangannya. Karena laporan keuangan tersebut menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Pada pelaporan keuangan Pemerintah Prov. Jawa Timur harus mengacu pada peraturan perundang – undangan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur keuangan daerah, salah satunya pada penyusunan laporan keuangan Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim, berlandaskan hukum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses penyusunan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, yang melalui Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka setiap SKPD dituntut untuk menyusun laporan keuangan dengan sebaik mungkin serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada dinas sudah menerapkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, hanya saja dalam menyusun laporan keuangan dinas dihadapkan masalah diantaranya, adalah hasil dari laporan keuangannya masih belum dan kurang sempurna.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada laporan keuangan di Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur dengan menerapkan Pergub Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur. Maka dari itu penulis wujudkan dalam sebuah Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Menyajikan Laporan Keuangan Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur”**.

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pergub No.5 Tahun 2017 tentang sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada penyajian laporan keuangan di Dinas PU Sumber Daya Air Prov.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

1. Bagi penulis

Mengembangkan wawasan dan teori dalam mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Pergub No.5 Tahun 2017 pada Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur dalam menyajikan laporan keuangannya. Mampu membandingkan perbedaan teori yang dikerjakan selama di bangku perkuliahan dengan teori yang diterapkan oleh kantor/perusahaan.

2. Bagi pembaca

Sebagai referensi menambah wawasan dan informasi bagi pembaca sebagai gambaran pemikiran yang mungkin akan melakukan kegiatan dalam bidang sektor pemerintahan. Sebagai pedoman untuk menerapkan Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan di waktu yang akan datang sesuai dengan Pergub No. 5 Tahun 2017.

3. Bagi Perusahaan

Mampu menjadi media yang menjembatani kerjasama antar Perguruan Tinggi (STIESIA) Surabaya dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur dalam hal akademik maupun non akademik. Mampu memberikan tolak ukur kualitas teori yang diajarkan dalam perkuliahan dengan teori yang dilakukan di dunia kerja.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Dalam pembahasan proposal penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka ditentukan pokok permasalahan seperti berikut :

1. Mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan entitas pemerintah daerah di Dinas PU Sumber Daya Air Pov. Jatim, mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Dinas, untuk mengetahui kesesuaian Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 5 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun Laporan Keuangan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Bahwa untuk penulisan proposal laporan tugas akhir ini, untuk mendapatkan berbagai informasi dan data pendukung lainnya yang bersifat skurat dengan melalui metode sebagai berikut :

1. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen tertulis atau elektronik dari perusahaan yang dibutuhkan oleh penulis untuk menunjang kelengkapan laporan penelitian ini.
2. Wawancara. Metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab atau wawancara langsung kepada pimpinan, kepala bagian dan karyawan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis sebagai kelengkapan laporan tugas akhir ini.

